

## DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN DI KALIMANTAN BARAT: PENDEKATAN SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI

**EDDY SURATMAN**

*Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tanjungpura, Pontianak  
Email: eddysuratman@yahoo.com*

### ABSTRACT

Economic crisis has led to worsening income distribution, widening the gaps between high income earners and the low ones. Economic crisis has also increased the number of the poor. This research was aimed to develop West Kalimantan Social Accounting Matrix of 2000. It was then used to analyze distribution of income and poverty in West Kalimantan.

Findings of this research show that (1) income distribution in West Kalimantan relatively spread evenly between the lower class (farming labors) and the higher class (urban people) that is, about 1.00 : 19.52, the low Gini index amounts to 0.24, and the income percentage of the lowest 40% group is 25.82%, far above 17 % of the World Bank Criteria; (2) the number of poor people in West Kalimantan in 2000 was 727,248 or 19.4% of the total population. Compared to that in 1999 that reached 26.2%, this number of poor was far lower. In addition, this number of poverty almost equaled the number of national poverty reported by BPS in 2000 that is, 18.95% of the whole population.

*Keywords: income distribution, poverty, Social Accounting Matrix, West Kalimantan*

### ABSTRAK

Krisis ekonomi mengakibatkan distribusi pendapatan semakin memburuk, dimana jurang pendapatan antara yang berpendapatan tinggi dan yang berpendapatan rendah amat lebar. Krisis ekonomi juga telah menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Penelitian ini bertujuan untuk membangun Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2000 lalu kemudian menggunakannya untuk menganalisis distribusi pendapatan dan kemiskinan di Kalimantan Barat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Distribusi pendapatan di Kalimantan Barat relatif merata karena ketimpangan pendapatan antara golongan bawah (buruh tani) dan golongan atas perkotaan relatif rendah yaitu sekitar 1,00 : 19,52, indeks Gini yang rendah yaitu sebesar 0,24, dan persentase pendapatan pada kelompok 40 persen terendah sebesar 25,82 persen, jauh diatas 17 persen (kriteria Bank Dunia); (2) Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat pada tahun 2000 sekitar 727.248 jiwa atau 19,4 persen dari seluruh jumlah penduduk. Dibanding keadaan tahun 1999 yang mencapai 26,2 persen, angka kemiskinan tersebut jauh lebih rendah. Disamping itu, Angka kemiskinan hasil studi ini hampir sama dengan angka kemiskinan nasional temuan BPS pada tahun 2000 yang besarnya 18,95 persen dari total jumlah penduduk.

*Kata kunci: distribusi pendapatan, kemiskinan, sistem neraca sosial ekonomi*

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 mengakibatkan terpuruknya kinerja perekonomian Kalimantan Barat. Pertumbuhan ekonominya pada tahun 1998 menjadi minus 4,71%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 1997 sebesar 7,53%. Distribusi pendapatan semakin memburuk, dimana jurang pendapatan antara yang berpendapatan tinggi dan yang berpendapatan rendah amat lebar. Hal ini tampak dari besarnya perbedaan antara rata-rata pendapatan bagi mereka yang bekerja di sektor formal dan mereka yang di sektor informal. Rata-rata pendapatan mereka yang berada di sektor formal ternyata 110% lebih tinggi dari rata-rata

pendapatan mereka yang berada di sektor informal (BPS Kalimantan Barat, 1998). Padahal sebagian besar (75,5%) jumlah tenaga kerja di daerah ini berada di sektor informal.

Krisis ekonomi juga telah menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Pada tahun 1999 angka kemiskinan di Provinsi ini sebesar 26,2%, jauh mengalami kenaikan dibanding tahun 1996 (sebelum krisis) yang hanya sekitar 18,7% (BPS Kalimantan Barat, 2000). Disamping itu, angka kemiskinan tersebut masih lebih besar dibanding angka kemiskinan nasional untuk tahun yang sama (1999) yaitu sebesar 23%.

#### Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membangun Sistem

Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2000 lalu kemudian menggunakannya untuk menganalisis distribusi pendapatan dan kemiskinan di Kalimantan Barat.

**TINJAUAN TEORITIS**

**Kerangka Dasar SNSE**

SNSE merupakan sebuah matriks yang merangkum neraca sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Kumpulan-kumpulan neraca (*account*) tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok, yakni kelompok neraca-neraca endogen dan kelompok neraca-neraca eksogen. Secara garis besar kelompok neraca-neraca endogen dibagi dalam tiga blok: blok neraca-neraca faktor produksi, blok neraca-neraca institusi dan blok neraca-neraca aktivitas (kegiatan) produksi. Untuk menyingkat penulisan, ketiga blok tersebut selanjutnya akan disebut sebagai blok faktor produksi, blok institusi dan blok kegiatan produksi.

Setiap neraca dalam SNSE disusun dalam bentuk baris dan kolom. Vektor baris menunjukkan perincian penerimaan, sedangkan vektor kolom menunjukkan perincian pengeluaran. Untuk kegiatan yang sama, jumlah baris sama dengan jumlah kolom, dengan kata lain jumlah penerimaan sama dengan pengeluaran. Susunan SNSE secara sederhana dapat dilihat pada Tabel 1. Untuk setiap baris, kolom 5 merupakan penjumlahan dari kolom 1, 2, 3, dan 4. Demikian pula untuk setiap kolom, baris 5 merupakan penjumlahan dari baris 1, 2, 3, dan 4. Karena jumlah penerimaan sama dengan pengeluaran, maka baris 5 merupakan *transpose* dari kolom 5.

Di dalam tabel SNSE di atas terdapat beberapa matriks. Matriks *T* merupakan matriks transaksi antar

blok dalam neraca endogen. Matriks *X* menunjukkan pendapatan neraca endogen dari neraca eksogen. Matriks *L* menunjukkan pengeluaran neraca endogen untuk neraca eksogen, disebut juga *leakages*. Matriks *Y* merupakan pendapatan total dari neraca endogen. Sedangkan matriks *Y'* merupakan pengeluaran total dari neraca endogen.

Dari tabel SNSE tersebut, distribusi pendapatan neraca endogen dapat dirinci menjadi:

1. Jumlah pendapatan faktor produksi =  $Y_1 = T_{1,3} + X_1$
2. Jumlah pendapatan institusi =  $Y_2 = T_{2,1} + T_{2,2} + X_2$
3. Jumlah pendapatan kegiatan produksi =  $Y_3 = T_{3,2} + T_{3,3} + X_3$

Sedangkan distribusi pengeluaran neraca endogen dapat dirinci menjadi:

4. Jumlah pengeluaran faktor produksi =  $Y'_1 = T_{2,1} + L_1$
5. Jumlah pengeluaran institusi =  $Y'_2 = T_{2,2} + T_{3,2} + L_2$
6. Jumlah pengeluaran kegiatan produksi =  $Y'_3 = T_{1,3} + T_{3,3} + L_3$

Matriks *T* sebagai matriks transaksi antar blok di dalam neraca endogen dapat ditulis sebagai berikut:

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & T_{1,3} \\ T_{2,1} & T_{2,2} & 0 \\ 0 & T_{3,2} & T_{3,3} \end{bmatrix} \dots\dots\dots(7)$$

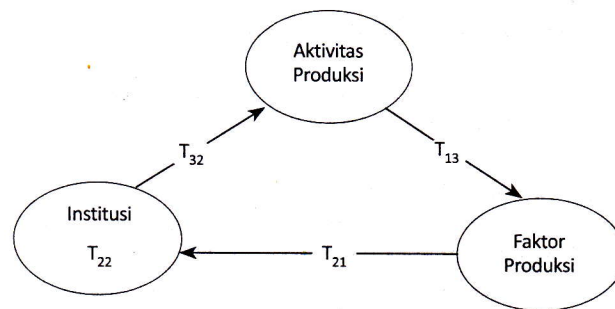
Sebagai salah satu submatriks dari SNSE, matriks *T* juga menggambarkan transaksi penerimaan dan pengeluaran, dengan lingkup yang lebih sempit, yakni di dalam neraca endogen.

Ditinjau dari sama tidaknya blok yang bertransaksi, maka di dalam matriks transaksi *T* diatas terdapat transaksi yang terjadi antar blok yang berbeda seperti  $T_{1,3}$ ,  $T_{2,1}$ ,  $T_{3,2}$  dan yang terjadi di dalam blok yang sama seperti  $T_{2,2}$  dan  $T_{3,3}$ . Hubungan tersebut bisa dilihat pada Gambar 1. Tanda panah dalam Gambar 1. menunjukkan aliran uang.

Tabel 1. Kerangka Dasar SNSE

		Pengeluaran					
		Neraca Endogen			Neraca Eksogen	Total	
		Faktor Produksi	Institusi	Kegiatan Produksi			
		1	2	3	4	5	
PENERIMAAN	Faktor Produksi	1	0	0	$T_{13}$ Distribusi Nilai Tambah	$X_1$ Pendapatan Eksogen Fakt. Prod.	$Y_1$ Jumlah Pendapatan Fakt. Prod.
	Institusi	2	$T_{21}$ Pendapatan Institusi dari Faktor Produksi	$T_{22}$ Transfer Antar Institusi	0	$X_2$ Pendapatan Institusi Dari Ekso-gen	$Y_2$ Jumlah Pendapatan Institusi
	Kegiatan Produksi	3	0	$T_{32}$ Permintaan Akhir Domestik	$T_{33}$ Transaksi Antar Keg. (I-O)	$X_3$ Ekspor Dan Investasi	$Y_3$ Jumlah Output Kegiatan Produksi
	Neraca Eksogen	4	$L_1$ Peng. Ekso. Fakt. Prod.	$L_2$ Tabungan	$L_3$ Impor & pjk Tak langsung	R Trans. Antar Eksogen	Juml. Pend. Eksogen
	Jumlah	5	$Y'_1$ Juml. Pengl. Fakt. Prod.	$Y'_2$ Juml. Pengl. Institusi	$Y'_3$ Juml. Pengl. Keg. Prod.	Juml. Pengl. Eksogen	

Sumber: Thorbecke, 1988 : 210, dimodifikasi



Sumber: Thorbecke (1988)

Gambar 1. Transaksi Antar Blok dalam SNSE

Matriks transaksi *T* di atas menunjukkan aliran penerimaan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan moneter. Apabila setiap sel dalam matriks *T* dibagi dengan jumlah kolomnya, maka akan didapatkan sebuah matriks baru yang menunjukkan besarnya kecenderungan pengeluaran rata-rata (*average*

expenditure propensity) yang dinyatakan dalam proporsi (perbandingan). Matriks baru tersebut, katakanlah matriks  $A$ , unsur-unsurnya adalah  $A_{ij}$  yang merupakan hasil pembagian nilai  $T$  pada baris ke  $i$  dan kolom ke  $j$  ( $T_{ij}$ ) oleh jumlah kolom ke  $j$ , yang dapat dirumuskan sebagai:

$$A_j = T_j \hat{Y}_j^{-1} \dots\dots\dots(8)$$

dalam hal ini  $\hat{Y}_j$  adalah matriks diagonal dari nilai-nilai jumlah kolom.

Sehingga :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & A_{1,3} \\ A_{2,1} & A_{2,2} & 0 \\ 0 & A_{3,2} & A_{3,3} \end{bmatrix} \dots\dots\dots(9)$$

Oleh karena itu, maka :

(10)  $Y = AY + X$ , atau

(11)  $Y = (I - A)^{-1}X$

Kalau  $M_a = (I - A)^{-1}$ , maka

(12)  $Y = M_a X$

Dalam hal ini  $A$  berisi koefisien-koefisien yang menunjukkan pengaruh langsung dari perubahan yang terjadi pada sebuah sektor terhadap sektor yang lain. Sedangkan  $M_a$  yang dinamakan pengganda neraca (*accounting multiplier*) merupakan pengganda yang menunjukkan pengaruh perubahan pada sebuah sektor terhadap sektor lainnya setelah melalui keseluruhan sistem SNSE.

**Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan**

Dalam analisis kemiskinan dikenal beberapa indikator penting yang dapat dipergunakan untuk mengukur insiden kemiskinan. Indikator yang paling sering dipergunakan adalah *head-count ratio* ( $P_0$ ). *Head-count ratio* ini memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Namun demikian, indikator ini tidak dapat mengindikasikan seberapa dalam tingkat kemiskinan yang terjadi, mengingat ukuran ini tetap tidak berubah jika seorang yang miskin menjadi lebih miskin. Oleh karena itu dikenal juga indikator kemiskinan yang lain, yaitu tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*,  $P_1$ ) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index*,  $P_2$ ). Tingkat kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan yaitu  $P_2$ . Penurunan pada  $P_1$  mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengindikasikan berkurangnya

kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan penurunan pada  $P_2$  mengindikasikan berkurangnya ketimpangan kemiskinan.

Penelitian mengenai kemiskinan telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Penelitian kemiskinan tersebut biasanya menelaah kemiskinan dalam pengertian absolut (*absolute poverty*) dan dalam pengertian relatif atau ketidakmerataan pendapatan (*income inequality*). Kedua pengertian kemiskinan tersebut merupakan dua konsep yang berbeda, dan dengan demikian ukuran kemiskinan yang digunakan juga berbeda.

Kemiskinan dalam pengertian absolut (seperti  $P_0$ ) dapat dikaitkan dengan harta atau penghasilan, atau kecukupan pada tingkat tertentu dalam konsumsi pangan. Misalnya, *World Bank* menggunakan pendapatan perkapita sebesar US \$ 75 per tahun sebagai ukuran kemiskinan atau yang biasa juga disebut sebagai garis kemiskinan (*poverty line*). Sayogyo menggunakan ukuran ekivalen beras 240 kilogram dan 360 kilogram per kapita per tahun sebagai garis kemiskinan untuk masing-masing daerah pedesaan dan perkotaan. Sedangkan BPS menggunakan ukuran konsumsi energi minimum sebanyak 2100 kilokalori per kapita per hari sebagai batas miskin. Seseorang yang berada dibawah batas tersebut dikelompokkan sebagai penduduk miskin atau rumah tangga miskin.

Sementara itu, kemiskinan dalam ukuran relatif lebih mendekati kepada permasalahan ketidakmerataan pendapatan, yaitu suatu ukuran yang membandingkan pendapatan seseorang atau sekelompok orang dengan orang atau kelompok yang lain (Atkinson, 1975 dan 1987). Ukuran yang biasa digunakan adalah ratio Gini (disebut juga sebagai koefisien atau indek Gini) dan ukuran *World Bank* (Todaro, 1987). Ratio Gini dirumuskan sebagai berikut:

$$G = \frac{\sum P_i(Y_i + Y_{i-1})}{10.000}$$

dimana:

$G$  = Ratio Gini yaitu rasio antara persentase kumulatif jumlah golongan rumah tangga dengan persentase kumulatif jumlah pendapatan golongan rumah tangga.

$P_i$  = Persentase kumulatif jumlah golongan rumah tangga kelas ke- $i$ .

$Y_i$  = Persentase kumulatif jumlah pendapatan golongan rumah tangga kelas ke- $i$ .

Ratio Gini mempunyai nilai diantara 0 dan 1. Bila ratio Gini bernilai 0 berarti distribusi pendapatan berada pada tingkat yang sangat merata, sebaliknya bila bernilai 1 berarti distribusi pendapatan berada pada tingkat yang sangat tidak merata. Dalam kaitan ini Todaro (1987) mengatakan bahwa:

1. Bila ratio Gini berada diantara 0,2 sampai dengan 0,35, maka distribusi pendapatan disebut relatif merata.
2. Bila ratio Gini berada diantara 0,35 sampai dengan 0,50, maka distribusi pendapatan disebut tidak merata.

3. Bila ratio Gini berada diantara 0,50 sampai dengan atau lebih dari 0,70, maka distribusi pendapatan disebut sangat tidak merata.

Sedangkan ukuran *World Bank* menganalisa masalah ketidakmerataan pendapatan dengan membagi penduduk menjadi tiga kelompok, yaitu: 40 persen berpendapatan rendah; 40 persen berpendapatan menengah; dan 20 persen berpendapatan tinggi. Apabila 40 persen penduduk berpendapatan rendah; Menerima kurang dari 12 persen dari total pendapatan, maka ketidakmerataan pendapatan disebut tinggi; Menerima antara 12 persen sampai dengan 17 persen dari total pendapatan, maka ketidakmerataan pendapatan disebut sedang; Menerima lebih dari 17 persen dari total pendapatan, maka ketidakmerataan pendapatan disebut rendah.

## METODE PENELITIAN

### Prosedur Penyusunan Tabel SNSE

Metodologi yang digunakan dalam menyusun tabel SNSE Kalimantan Barat mengikuti cara yang dilakukan oleh Keuning dan Ruijter (1988) ketika membangun SNSE Indonesia (1982) dan SNSE Srilangka (1986), serta Resosudarmo dan kawan-kawan (1999) ketika membangun SNSE DKI Jakarta. Adapun tahapan prosedur yang akan dilakukan dapat dilihat pada Gambar 1.

### Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam membangun SNSE berbeda-beda, tergantung dari rancangan keseluruhan SNSE yang akan dibangun. Untuk pembuatan SNSE Provinsi Kalimantan Barat, data

yang akan digunakan bersumber dari buku-buku statistik berikut: (1) Input-Output Provinsi Kalimantan Barat tahun 2000; (2) Sensus Penduduk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2000; (3) SNSE Indonesia 2000; (4) Inter-regional Input-Output Indonesia 2000; (5) Survei Penduduk Provinsi Kalimantan Barat 1995; (6) Pengeluaran Konsumsi Penduduk Indonesia 1996 dan 1999; (7) Statistik Keuangan Provinsi Kalimantan Barat 1999/2000; (8) Keadaan Sosial Budaya Penduduk Provinsi Kalimantan Barat 2000; (9) Indikator kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat 2000; dan (10) Keadaan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Barat 2000.

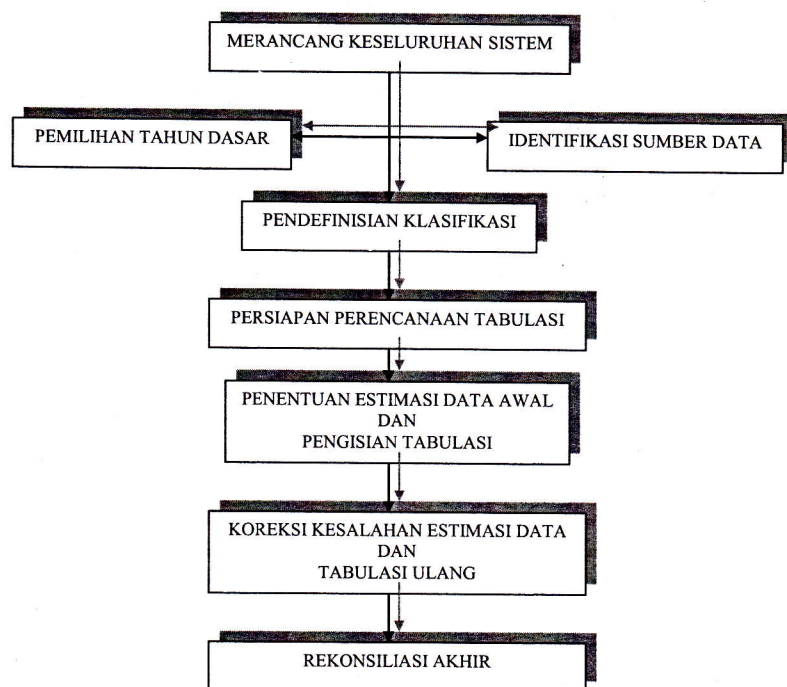
Setelah SNSE Kalimantan Barat berhasil dibangun, maka selanjutnya dapat dianalisis hubungan antara satu neraca dengan neraca lainnya. Misalnya, analisis distribusi pendapatan faktorial (tenaga kerja dan modal) dapat dilakukan dengan melihat hubungan antara neraca sektor produksi dengan neraca faktor produksi; analisis distribusi pendapatan rumah tangga dapat dilakukan dengan melihat hubungan antara neraca faktor produksi dengan neraca institusi; demikian halnya dengan hubungan neraca lainnya. Dalam studi ini metode analisis yang akan dilakukan antara lain: analisis distribusi pendapatan rumah tangga dan analisis kemiskinan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Distribusi Pendapatan Rumah Tangga

Kerangka SNSE Provinsi Kalimantan Barat tahun 2000 ukuran 51X51 merinci rumah tangga menjadi 8 golongan, yaitu: (1) Rumah tangga buruh pertanian; (2) Rumah tangga pengusaha pertanian; (3) Rumah tangga bukan pertanian golongan rendah di pedesaan; (4) Rumah tangga bukan pertanian penerima pendapatan di pedesaan; (5) Rumah tangga bukan pertanian golongan atas di pedesaan; (6) Rumah tangga bukan pertanian golongan rendah di perkotaan; (7) Rumah tangga bukan pertanian penerima pendapatan di perkotaan, dan (8) Rumah tangga bukan pertanian golongan atas di perkotaan.

Rumah tangga nomor 1 dan 2 adalah rumah tangga dimana kepala rumah tangga bekerja atau menerima pendapatan terbesar dari hasil balas jasa bekerja di sektor pertanian, yaitu sebagai buruh pertanian dan sebagai pengusaha pertanian. Rumah tangga nomor 3 sampai dengan 8 adalah rumah tangga bukan pertanian dimana kepala rumah tangga bekerja di sektor bukan pertanian atau menerima pendapatan terbesar dari hasil balas jasa bekerja di sektor bukan pertanian. Termasuk dalam golongan rumah tangga golongan rendah adalah rumah tangga yang memperoleh



Gambar 1. Bagan Prosedur Pembuatan SNSE

Tabel 2. Distribusi Pendapatan Disposabel per Kapita Provinsi Kalimantan Barat Menurut Golongan Rumah tangga, 2000

Golongan Rumahtangga	Jumlah penduduk (Jiwa)	Total Pendapatan Disposabel (Rp Juta)	Pendapatan Disposabel per Kapita (Rp Ribu)
Rumahtangga buruh tani	222.586	267 082,1	1 199,9
Rumahtangga pengusaha pertanian	1.835.713	3 976 381,3	2 166,1
Rumahtangga bukan pertanian golongan bawah di pedesaan	504.662	711 196,4	1 409,3
Rumahtangga bukan pertanian penerima pendapatan di pedesaan	148.456	301 155,7	2 028,6
Rumahtangga bukan pertanian golongan atas di pedesaan	206.898	447 773,5	2 164,2
Rumahtangga bukan pertanian golongan bawah di perkotaan	590.702	1 251 001,9	2 117,8
Rumahtangga bukan pertanian penerima pendapatan di perkotaan	136.357	375 071,2	2 750,
Rumahtangga bukan pertanian golongan atas di perkotaan	105.421	2 468 750,1	23 418,0
Jumlah	3 750 795	9 798 412,3	2 612,4

Sumber: Diolah dari SNSE Kalbar Tahun 2000

pendapatan sebagai balas jasa dari bekerja sebagai pengusaha bebas golongan rendah, tenaga tata-usaha golongan rendah, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan (seperti supir bis, kondektur bis), pekerja bebas sektor jasa perorangan, pekerja kasar, atau yang sejenis; Sedangkan yang termasuk sebagai rumah tangga golongan atas adalah rumah tangga yang memperoleh pendapatan sebagai balas jasa dari bekerja sebagai manajer, profesional (seperti akuntan, dokter), militer, guru/dosen/guru besar, pekerja tata usaha dan penjualan golongan atas. Sedangkan rumah tangga penerima pendapatan adalah rumah tangga dengan pendapatan kepala rumah tangga yang utama berasal dari transfer seperti pensiunan, transfer dari anak atau menerima balas jasa kapital dari kekayaan yang dimilikinya.

Distribusi pendapatan menurut golongan rumah tangga disajikan oleh Tabel 2. Distribusi pendapatan ini disajikan dalam bentuk pendapatan disposabel (*disposable income*) per kapita. Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa:

a. Secara rata-rata, pendapatan disposabel per kapita di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2000

Tabel 3. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Kalimantan Barat Tahun 2000

Golongan Rumah tangga	Pendapatan Disposable (Rp. Juta) $Y_i$	Jumlah Rumah tangga (Unit) $P_i$	$Y_i$ (%)	$P_i$ (%)	$Y_i$ (Kum)	$Y_i + Y_{i-1}$	$P_i (Y_i + Y_{i-1})$
1	267.082,1	53.035	2,72	6,61	2,72	2,72	17,9792
2	3.976.381,3	386.424	40,58	48,17	43,30	46,02	2216,7834
3	711.196,4	106.222	7,26	13,24	50,56	93,86	1242,7064
4	301.155,7	35.593	3,07	4,44	53,63	104,19	462,6063
5	447.773,5	45.462	5,57	5,67	58,20	111,83	634,0761
5	1.251.001,9	120.615	12,77	15,03	70,97	129,17	1941,4251
7	375.071,2	31.731	3,83	3,95	74,80	145,77	575,7915
8	2.468.750,1	23.150	25,20	2,89	100,00	174,80	505,1720
Total	9.798.412,3	802,232	100	100			7596,5373

Catatan :

- Diolah dari SNSE Kalbar Tahun 2000 dan Tabel 2

$$\text{Indeks Gini} : G = \frac{\sum P_i(Y_i + Y_{i-1})}{10.000}$$

$$= 1 - \frac{7596,5373}{10.000} = 1 - 0,76 = 0,24$$

berjumlah Rp 2.612,4 ribu per tahun;  
 b. Rata-rata pendapatan disposabel rumah tangga buruh tani berjumlah Rp 1.199,9 ribu per tahun dan merupakan rumah tangga berpendapatan paling rendah. Sedangkan rumah tangga bukan pertanian golongan atas di perkotaan, dengan pendapatan disposabel sebesar Rp 23.418,0 ribu per tahun, merupakan golongan rumah tangga dengan pendapatan disposabel tertinggi.

Dari Tabel 2 juga dapat dilihat bahwa rumah tangga pertanian yang proporsinya sebesar 55 persen dari seluruh rumah tangga yang ada, dapat menikmati 43,31 persen pendapatan disposabel yang tercipta di Kalimantan Barat yang besarnya mencapai Rp 9 798,41 milyar. Ketimpangan pendapatan antara golongan bawah (buruh tani) dan golongan atas perkotaan sekitar 1,00 : 19,52. Keadaan ini secara tidak langsung memberi gambaran bahwa distribusi pendapatan di Kalimantan Barat relatif merata. Bandingkan dengan keadaan DKI Jakarta hasil SNSE tahun 2000, dimana 50 persen penduduk golongan bawah hanya menikmati 14,61 persen dari seluruh pendapatan disposable yang tercipta. Disamping itu, ketimpangan antara golongan bawah dan golongan atas di DKI Jakarta mencapai 1,00 ; 49,39.

Untuk mengetahui secara jelas apakah benar distribusi pendapatan di Kalimantan Barat relatif merata, maka indek Gini akan dihitung dengan menggunakan informasi yang terdapat pada Tabel 2. Prosedur perhitungan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi pendapatan di Kalimantan Barat berada dalam keadaan yang relatif merata karena indek Gini yang sebesar 0,24. Hasil ini tampaknya logis karena pendapatan tertinggi sebesar 40,58 persen diterima oleh penduduk terbanyak sebesar 48,17 persen dari total rumah tangga; dan pendapatan terendah sebanyak 2,72 persen hanya diterima oleh persentase penduduk sebesar 6,61 persen.

Angka indek Gini hasil perhitungan di atas ternyata masih lebih rendah dibandingkan dengan indek Gini nasional tahun 2000 hasil perhitungan BPS yaitu sebesar 0,29. Bahkan indek Gini hasil perhitungan ini juga lebih rendah dibandingkan indek Gini Kalimantan Barat tahun 2000 hasil perhitungan BPS yang besarnya 0,28 (BPS, 2001). Namun demikian, perbedaan indek Gini ini masih berada pada kisaran yang sama, sehingga menghasilkan kesimpulan yang sama.

Disamping indek Gini, Kriteria Bank Dunia adalah salah satu indikator ekonomi untuk menilai tingkat ketidakmerataan pendapatan penduduk suatu negara atau daerah. (BPS, 2001). Berdasarkan kriteria ini juga dapat disimpulkan bahwa distribusi pendapatan di Kalimantan Barat relatif merata. Hal ini tampak dari persentase pendapatan pada kelompok 40

persen terendah sebesar 25,82 persen, jauh diatas 17 persen.<sup>1</sup>

Meskipun distribusi pendapatan di Kalimantan Barat saat ini relatif merata, namun langkah-langkah untuk menjaga agar ketimpangan tidak kembali muncul harus terus dilakukan. Apalagi melihat kecenderungan masih adanya ketimpangan perekonomian antar kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Ketimpangan perekonomian tersebut terlihat dari adanya dua daerah yaitu kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak yang kontribusinya terhadap perekonomian Kalimantan Barat diatas 20 persen, sementara terdapat satu daerah yaitu kabupaten Kapuas Hulu yang kontribusinya hanya 3,84 persen serta kabupaten Sintang dan Bengkayang yang kontribusinya hanya sekitar 6 persen. Dalam kaitan ini salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah reorientasi investasi baik swasta maupun pemerintah yang selama ini terpusat di kota Pontianak dan kabupaten Pontianak ke wilayah lain di Kalimantan Barat. Mengingat daerah ini berbatasan langsung dengan Negara bagian Serawak Malaysia, maka kebijakan pengembangan kawasan perbatasan yang mencakup lima kabupaten di Kalimantan Barat barangkali menjadi salah satu pilihan yang tepat.

### Kemiskinan Rumah Tangga

Golongan rumah tangga yang secara relatif mempunyai pendapatan disposabel terendah di Kalimantan Barat adalah golongan rumah tangga buruh tani (lihat juga Tabel 2). Dengan kata lain, golongan rumah tangga ini secara relatif merupakan rumah tangga paling miskin di Kalimantan Barat. Akan tetapi hasil ini belum dapat menjelaskan mengenai rumah tangga miskin dalam ukuran absolut karena hasil tersebut baru menjelaskan mengenai penyebaran atau distribusi pendapatan diantara golongan rumah tangga. Disamping itu, hasil tersebut juga belum dapat diinterpretasikan bahwa semua penduduk pada golongan rumah tangga buruh tani yang jumlahnya sebanyak 222.586 jiwa tergolong sebagai penduduk miskin. Bisa saja terdapat sebagian penduduk pada golongan rumah tangga buruh tani yang tidak termasuk sebagai penduduk miskin, meskipun secara rata-rata golongan rumah tangga ini memiliki pendapatan per kapita terendah; atau sebaliknya. Hal ini terjadi karena adanya variasi pendapatan antar penduduk (antar-rumah tangga) dalam masing-masing golongan rumah tangga.

Secara umum, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat

memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2100 kilokalori per kapita per hari, perumahan, pakaian, kesehatan dan pendidikan. Jumlah uang tersebut kemudian disebut sebagai garis kemiskinan (Indikator Kesejahteraan Rakyat, Susenas, BPS, 2001).

Pada bagian ini akan dilakukan pendugaan terhadap banyaknya penduduk miskin dan penentuan rumah tangga miskin dalam ukuran absolut di Kalimantan Barat. Untuk keperluan itu, ukuran kemiskinan yang berupa pendapatan minimum untuk dapat mengkonsumsi 2100 kilokalori per kapita per hari akan digunakan. Akan tetapi, karena ukuran ini belum tersedia, maka ukuran tersebut harus diduga terlebih dahulu. Pendugaan dilakukan dengan cara menghubungkan pendapatan dan konsumsi makanan dengan menggunakan golongan rumah tangga buruh tani sebagai obyek penelitian. Golongan rumah tangga buruh tani dipilih dengan alasan, data yang tersedia hanya diperoleh dari golongan rumah tangga ini.

Hasil yang ditemukan adalah, pada tahun 2000 ternyata golongan rumah tangga buruh tani di Kalimantan Barat masih belum dapat mengkonsumsi makanan secara cukup yaitu sebanyak 2100 kilokalori per kapita per hari. Dengan rata-rata pendapatan disposabel per kapita sebesar Rp 1.199,91 ribu, golongan rumah tangga buruh tani hanya dapat mengkonsumsi makanan per kapita per hari sebanyak 1785,6 kilokalori (Susenas, BPS, 2000). Berdasarkan hubungan ini berarti dapat dianalogikan bahwa untuk dapat mengkonsumsi sebanyak 2100 kilokalori per kapita per hari di Kalimantan Barat dibutuhkan pendapatan minimal sebesar Rp 1.411,18 ribu pertahun (yaitu  $2100/1785,6$  dikali dengan Rp 1.199,91 ribu). Besaran ini dapat dianggap sebagai batas atau garis kemiskinan dalam ukuran absolut di provinsi Kalimantan Barat.

Berpedoman pada batasan garis kemiskinan sebesar Rp 1.411,18 ribu diatas, maka dapat disimpulkan bahwa golongan rumah tangga miskin di Kalimantan Barat adalah:

1. Rumah tangga buruh tani dengan pendapatan perkapita sebesar Rp 1.199,91 ribu.
2. Rumah tangga golongan bawah di pedesaan dengan pendapatan perkapita sebesar Rp 1.409,25 ribu.

Dengan demikian, jumlah penduduk miskin di provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2000 sekitar 727.248 jiwa atau 19,4 persen dari seluruh jumlah penduduk. Akan tetapi dibanding keadaan tahun 1999 yang mencapai 26,2 persen, angka kemiskinan tersebut jauh lebih rendah (BPS, 2000). Disamping itu, Angka kemiskinan hasil studi ini hampir sama dengan angka kemiskinan nasional temuan BPS pada tahun 2000 yang besarnya 18,95 persen dari total jumlah penduduk.

Ada beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab kemiskinan rumah tangga di Kalimantan Barat yaitu; *pertama*, pendapatan rumah tangga relatif masih rendah sehingga semua pendapatan habis digunakan untuk konsumsi. Hampir tidak ada pendapatan yang

1 Dalam penelitian ini penduduk berpendapatan rendah terdiri dari rumah tangga buruh tani, rumah tangga golongan bawah dan penerima pendapatan di pedesaan, dan rumah tangga golongan bawah di perkotaan. Jumlah mereka sebanyak 1.466.406 orang atau sekitar 40 persen dari seluruh penduduk Kalimantan Barat.

dapat ditabung untuk maksud pembentukan modal; *kedua*, tingkat pendidikan atau keterampilan mereka yang relatif rendah sehingga menyebabkan *marginal product of labor* (MPL) rendah yang berimplikasi kepada rendahnya tingkat upah atau balas jasa yang diterima oleh tenaga kerja; *Ketiga*, banyak diantara mereka yang berstatus sebagai pekerja keluarga dengan tingkat upah yang rendah.

Temuan diatas memberikan pemahaman kepada kita bahwa pada umumnya penyebab kemiskinan rumah tangga di Kalimantan Barat adalah karena rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sumber daya modal yang dimiliki sehingga hasil yang diperoleh oleh rumah tangga juga menjadi rendah yang pada akhirnya menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan itu kemudian menyebabkan rumah tangga tidak mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kuantitas sumber daya modal. Akibatnya, mereka menganggur karena kualifikasi sumber daya manusia yang dihasilkan oleh rumah tangga ini tidak dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh pasar kerja, atau karena ketidakmampuan rumah tangga ini untuk mengembangkan usaha rumah tangga sebagai akibat tidak tersedianya sumber daya modal, dan sebagainya. Keadaan ini mencerminkan bahwa kemiskinan rumah tangga merupakan efek sirkular dari kemiskinan itu sendiri, kemiskinan menyebabkan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Distribusi pendapatan di Kalimantan Barat berada dalam keadaan yang relatif merata karena ketimpangan pendapatan antara golongan bawah (buruh tani) dan golongan atas perkotaan relatif rendah yaitu sekitar 1,00 : 19,52 dan indek Gini yang sebesar 0,24. Berdasarkan kriteria Bank Dunia juga dapat disimpulkan bahwa distribusi pendapatan di Kalimantan Barat relatif merata. Hal ini tampak dari persentase pendapatan pada kelompok 40 persen terendah sebesar 25,82 persen, jauh diatas 17 persen.

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat pada tahun 2000 sekitar 727.248 jiwa atau 19,4 persen dari seluruh jumlah penduduk. Akan tetapi dibanding keadaan tahun 1999 yang mencapai 26,2 persen, angka kemiskinan tersebut jauh lebih rendah. Disamping itu, Angka kemiskinan hasil studi ini hampir sama dengan angka kemiskinan nasional temuan BPS pada tahun 2000 yang besarnya 18,95 persen dari total jumlah penduduk.

Beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab kemiskinan di Kalimantan Barat adalah; *pertama*, pendapatan rumah tangga relatif masih rendah sehingga semua pendapatan habis digunakan untuk konsumsi. Hampir tidak ada pendapatan yang dapat ditabung untuk maksud pembentukan modal; *kedua*, tingkat pendidikan atau keterampilan mereka yang relatif rendah sehingga menyebabkan *marginal product*

*of labor* (MPL) rendah yang berimplikasi kepada rendahnya tingkat upah atau balas jasa yang diterima oleh tenaga kerja; *Ketiga*, banyak diantara mereka yang berstatus sebagai pekerja keluarga dengan tingkat upah yang rendah.

### Rekomendasi

Untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota, penting dilakukan reorientasi investasi baik swasta maupun pemerintah yang selama ini terpusat di kota Pontianak dan kabupaten Pontianak ke wilayah lain di Kalimantan Barat. Mengingat daerah ini berbatasan langsung dengan Negara bagian Serawak Malaysia, maka kebijakan pengembangan kawasan perbatasan yang mencakup lima kabupaten di Kalimantan Barat menjadi pilihan yang tepat.

Temuan diatas memberikan pemahaman kepada kita bahwa pada umumnya penyebab kemiskinan rumah tangga di Kalimantan Barat adalah karena rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sumber daya modal. Oleh karena itu, prioritas kebijakan yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja baik melalui pendidikan maupun pelatihan dan mendekatkan akses tenaga kerja terhadap sumberdaya modal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antara, Made. 1999. Dampak Pengeluaran Pemerintah dan Wisatawan Terhadap Kinerja Perekonomian Bali: Pendekatan Social Accounting Matrix. Tidak Dipublikasikan. Disertasi Doktor Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik. 2002. Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia. Buku 1 dan 3.
- Badan Pusat Statistik. 2002. Indikator Kesejahteraan Rakyat 2001.
- Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, beberapa terbitan
- Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 2000. Tinjauan Perekonomian Kalimantan Barat Tahun 2000.
- Biro Pusat Statistik. 1986. Laporan Penyusunan Model Sistem Neraca Sosial Ekonomi: Model Disagrega Statis.
- Biro Pusat Statistik. 1994. Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 1990.
- Biro Pusat Statistik. 1995. Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 1993.
- Biro Pusat Statistik. 1996. Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 1995.
- Biro Pusat Statistik. 1999. Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 1998.
- Biro Pusat Statistik. 1999. Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi, Buku 3.
- Biro Pusat Statistik. 2000. Statistik Kesejahteraan Rakyat, Survei Sosial Ekonomi Nasional.
- Cohen, S.I. 1989. *Multiplier Analysis in Social Accounting and Input-Output Framework: Eviden for Several Countries*. Dalam Miller, R.E., K.R. Polenske and A. Rose (eds.), *Frontier of Input-Output Analysis*. Oxford University Press: 78-99.
- Defourny, J. and E. Thorbecke. 1984. *Structural Path Analysis and Multiplier Decomposition with A Social Accounting Matrix Framework*. The Economic Journal, 94(3): 111-136.
- Dhanani, S. dan Iyanatul Islam. 2000. *Poverty, Inequality and Social Protection: Lessons from The Indonesian Crisis*. UNSFIR

- Working Paper 00/01, Jakarta.
- Hadi, S. 1998. Studi Dampak Kebijakan Pembangunan Terhadap Disparitas Ekonomi Antar Wilayah: Pendekatan Model Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi. Tidak Dipublikasikan. Disertasi Doktor, Institut Pertanian Bogor.
- Hamid, Sri Handoyo Mukti dan Tien Widiyanto. 2001. Kawasan Perbatasan Kalimantan: Permasalahan dan konsep pengembangan. Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah, BPPT.
- Hidayat, T. 1988. *A Social Accounting Matrix Framework for Planning in Indonesia*. Unpublished. A Thesis, Cornell University.
- Hidayat, T. 1991. *The Construction of A Two-Region Social Accounting Matrix for Indonesia and Its Application to Some Equity Issues*. Unpublished Ph.D. dissertation, Cornell University.
- Keuning, S.J. and Willem de Ruijter. 1990. *The Social Accounting Framework: Outline of Construction Stages and Organization of Work*. Dalam J. Alarcon, J.v. Heemst, S. Keuning, W.de Ruijter and R. Vos (eds.), *The Social Accounting Framework for Development: Concepts, Construction and Applications*. Avebury: 191-221.
- King, B.B. 1988. *What is a SAM?* Dalam G. Pyatt and J.I. Round (eds.), *Social Accounting Matrices: A Basis for Planning*. The World Bank, Washington, DC.
- Lewis, B. and E. Thorbecke. 1992. *District-Level Economic Linkages in Kenya: Evidence Based on a Small Region Social Accounting Matrix*. *World Development*, 20: 881-897.
- Lipsey, E. Richard 1999. "Role of Foreign Direct Investment in International Capital Flows", National Bureau of Economic Research, Working Paper no 7094
- Ray, Debraj 1997. *Development Economics*, Princeton University Press, Princeton University, New Jersey, USA
- Resosudarmo, B.P, S. Prihawantoro, M. Askinatin. 1999. *Membangun Sistem Neraca Sosial Ekonomi Tingkat Propinsi di Indonesia: Kasus DKI Jakarta*. Dalam Alkadri, Muchdie dan Suhandoyo (eds.). *Tiga Pilar Pengembangan Wilayah: Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia, Teknologi*. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi: 69-87.
- Resosudarmo, B.P, S. Prihawantoro, J. Hartono. 2002. *Krisis Ekonomi dan Dampaknya pada Distribusi Pendapatan DKI Jakarta*. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol XLX, No.2, hal 157-182.
- Round, J.I. 1985. *Decomposing Multipliers for Economic Systems Involving Regional and World trade*. *The Economic Journal*, 95, 383-399.
- Subramanian, S. and Sadoulet, E. 1990. *The Transmission of Production Fluctuations and Technical Change in A Village Economy: A Social Accounting Matrix Approach*. The University of Chicago, 130-167.
- Sutomo, S. 1991. *Matrik Pengganda (Multiplier Matrix) Dalam Kerangka Sistem Neraca Sosial Ekonomi*. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol 39, No.1, hal 19-50.
- Thorbecke, E. 1988. *The Social Accounting Matrix and Consistency-Type*. Dalam G. Pyatt and J.I. Round (eds.), *Social Accounting Matrices: A Basis for Planning*, The World Bank, Washington, D.C.
- Thorbecke, E. 1997. *Social Accounting Matrices and Social Accounting Analysis*. Dalam Walter Isard (ed.), *Methods of Regional Analysis: An Introduction to Regional Science*.
- Todaro, Michael. 1987. *Economic Development in the Third World*. Longman, London.
- Varian, H 1992. *Microeconomics Analysis*, WW Norton Company, New York, London
- Wuryanto, L.E. 1996. *Fiscal Decentralization and Economic Performance in Indonesia: An Inter-regional Computable General Equilibrium Approach*. Unpublished Ph.D. dissertation, Cornell University